



UPAYA MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

Sri Nurhayati Qodriyatun*)

Abstrak

Dampak perubahan iklim sudah terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti mundurnya awal musim hujan, musim kemarau terjadi dua kali dalam setahun, ataupun curah hujan di atas normal. Kondisi ini menimbulkan masalah apabila tidak diantisipasi, sehingga program pemerintah dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi penting. Namun upaya tersebut belum berjalan secara optimal karena masalah perubahan iklim masih dipandang sebagai masalah lingkungan dan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DPR juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tanggung jawab DPR tersebut dapat dilakukan melalui pelaksanaan tiga fungsi DPR, yaitu melalui fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi.

Pendahuluan

Indonesia rentan terhadap perubahan iklim/cuaca karena wilayahnya yang berada di antara Benua Asia dan Australia dan di antara Samudera Pasifik dan Hindia; dilalui garis katulistiwa dan terdiri dari pulau dan kepulauan; juga terdapat banyak selat dan teluk. BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) memperkirakan bahwa intensitas El Nino kuat masih akan bertahan sampai awal 2016, yang mengakibatkan mundurnya awal musim hujan, dan akan berdampak pada mundurnya awal musim tanam dan lamanya musim paceklik. Di sisi lain, beberapa wilayah Indonesia akan mengalami curah hujan di atas normal. Berdasarkan

Prakiraan Musim Hujan Tahun 2015-2016 yang dilakukan BMKG, curah hujan di atas normal akan terjadi di wilayah:

- Sumatera, antara lain di sebagian besar Aceh, sebagian kecil Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung;
- Jawa, antara lain di sebagian besar wilayah Jawa Timur dan Madura, dan sebagian kecil Jawa Tengah;
- Nusa Tenggara, antara lain di Sumbawa Barat, Dompu, Manggarai Barat, Manggarai, dan Ngada;
- Kalimantan, antara lain di Malinau, Bulungan, Kutai Barat, Long Bawang, sebagian Kalimantan Utara, dan Barito Kuala;

*) Peneliti Madya Kebijakan Lingkungan pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
E-mail: sri.qodriyatun@dpr.go.id.



- e. Sulawesi, antara lain di Donggala, Luwu, Mamuju, dan Parigi Moutong; dan
- f. Maluku dan Papua, antara lain di Pulau Buru, Pulau Seram, Maluku Tenggara, Kota Jayapura, dan sebagian Keerom (BMKG, 2016).

Untuk wilayah yang mengalami curah hujan di atas normal akan dihadapkan pada terjadinya bencana banjir, tanah longsor, krisis air bersih, gagal panen, dan meningkatnya penyebaran penyakit demam berdarah. Bahkan beberapa wilayah yang sudah masuk musim hujan seperti di Lampung, Bengkulu, juga Padang, saat ini mengalami banjir dan tanah longsor akibat curah hujan yang tinggi. Bagi daerah-daerah pertanian seperti daerah sentra penghasil beras di Jawa Tengah dan Jawa Barat, mundurnya awal musim hujan berpengaruh terhadap awal musim tanam dan lamanya masa pেকেলিক.

Selain itu, BMKG juga memperkirakan wilayah Sumatera bagian utara dan Kalimantan Utara akan mendapat 2 kali musim kemarau di tahun 2016, yaitu di bulan Januari–Februari dan Agustus–September. Terjadinya musim kemarau dua kali dalam tahun 2016 tersebut perlu diwaspadai, terutama di wilayah Riau. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Pekanbaru tanggal 6 Januari 2016 ditemukan 4 titik panas yang tersebar di daerah Bengkalis, Meranti, dan Pelalawan. Wilayah provinsi ini sangat berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan karena lebih dari 50% wilayahnya merupakan kawasan gambut yang mudah terbakar ketika musim kemarau. Titik panas juga ditemukan di wilayah Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Potensi kebakaran hutan dan lahan juga diperkirakan terjadi di wilayah-wilayah lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian di Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Potensi ini didasarkan pada hasil analisa parameter cuaca yang dilakukan BMKG per 7 Januari 2016.

Mundurnya awal musim hujan, munculnya dua musim kemarau dalam satu tahun, serta terjadinya curah hujan di atas rata-rata normal di beberapa wilayah Indonesia adalah gambaran telah terjadi perubahan iklim di Indonesia sebagai dampak dari pemanasan global.

Pemanasan global terjadi sebagai akibat dari meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer bumi.

Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada munculnya berbagai kejadian ekstrem seperti disebutkan sebelumnya, tetapi juga dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin dan tidak tercapainya sasaran pembangunan yang telah ditargetkan. Oleh karena itu perlu ada upaya untuk mengantisipasinya,

Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim perlu dilakukan upaya mitigasi dan adaptasi. Menurut UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*), mitigasi adalah upaya intervensi manusia dalam mengurangi sumber atau penambah gas rumah kaca (GRK) yang telah menimbulkan pemanasan global. Sedangkan adaptasi adalah upaya menghadapi perubahan iklim dengan melakukan penyesuaian yang tepat, bertindak untuk mengurangi berbagai pengaruh negatifnya, atau memanfaatkan dampak positifnya (UNDP, 2007).

Pemerintah Indonesia sudah memasukkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan. Dalam RPJPN 2005-2025, perubahan iklim menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan. Kemudian diterjemahkan dalam RPJMN 2004 -2009, RPJMN 2010-2014, RPJMN 2015-2019, dan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan untuk mengantisipasi perubahan iklim. Upaya antisipasi perubahan iklim lebih spesifik dituangkan dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-PI) dan *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap* (ICCSR).

Agenda mitigasi diarahkan untuk mereduksi emisi gas rumah kaca pada sektor-sektor ekonomi prioritas, yaitu sektor energi, kehutanan, pertanian-perikanan, dan infrastruktur yang didasarkan pada penetapan sasaran-sasaran reduksi per sektornya. Sedangkan agenda adaptasi diarahkan untuk mengembangkan pola pembangunan yang tahan terhadap dampak perubahan iklim dan gangguan

anomali cuaca yang terjadi saat ini, danantisipasi dampaknya ke depan. Tujuan jangka panjangnya adalah terintegrasinya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan nasional dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Selain itu, harus berjalan bersamaan dengan usaha pemberantasan kemiskinan dan kegiatan pembangunan ekonomi karena masyarakat miskin merupakan golongan yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim (Kementerian Lingkungan Hidup, 2007).

Namun dalam praktiknya, berbagai dokumen perencanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tersebut belum dilaksanakan dengan baik. Dampak akibat perubahan iklim masih saja dirasakan oleh masyarakat. Banjir masih terjadi di mana-mana. Kebakaran hutan dan lahan masih saja belum dapat teratasi dengan segera seperti yang terjadi hampir setiap tahun, dan lain sebagainya. Selama ini, perubahan iklim hanya dilihat sebagai permasalahan lingkungan hidup semata dan menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Padahal semua kementerian dan lembaga, menurut UNDP perlu terlibat, karena perubahan iklim berdampak terhadap semua sektor dan sendi kehidupan manusia.

Tanggung Jawab Bersama

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa sektor akan terdampak atas perubahan iklim. Sektor pertanian akan dihadapkan pada masalah menurunnya produksi pertanian (terutama beras). Penurunan produksi pertanian ini tentunya akan mengancam ketahanan pangan. Menurunnya produksi bahan pangan mengakibatkan harga pangan di masyarakat perlahan mulai naik. Kemudian, di sektor infrastruktur akan dihadapkan dengan masalah banjir karena curah hujan di atas normal. Kondisi banjir akan mengakibatkan sulitnya masyarakat untuk mendapatkan air bersih dan meningkatnya penyebaran penyakit demam berdarah. Sektor kehutanan dan lingkungan hidup akan dihadapkan pada kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, yang jika tidak diantisipasi dengan cepat akan menimbulkan bencana asap seperti yang

terjadi pada tahun lalu. Banyak sektor akan terdampak secara langsung ataupun tidak langsung dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Oleh karena itu, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus dilakukan oleh berbagai sektor dan menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi juga kementerian-kementerian lain yang terkait. DPR juga ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Tanggung jawab DPR dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dapat dilakukan melalui pelaksanaan fungsi anggaran, pengawasan, dan legislasi. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR dapat mengarahkan pembiayaan APBN ditujukan untuk melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam berbagai sektor, seperti pembiayaan dalam pengembangan energi yang ramah lingkungan, mengantisipasi banjir, bencana longsor, kebakaran hutan dan lahan, pencegahan penyebaran penyakit akibat perubahan iklim, sosialisasi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan masih banyak hal lagi yang terkait.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, melalui beberapa Komisi yang terkait, DPR dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan ataupun program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Seperti Komisi IV yang bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan, dan Bulog dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya penurunan emisi GRK, mengatasi gagal panen, kebijakan impor beras, dan kebijakan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan.

Komisi V yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat mengawasi kebijakan pemerintah dalam pengurangan emisi dari sektor transportasi, mengantisipasi banjir, penyediaan air bersih, perbaikan infrastruktur yang ada untuk mengurangi dampak akibat perubahan iklim yang harus ditanggung masyarakat.

Komisi VI yang bermitra dengan Kementerian Perdagangan dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam impor bahan pangan akibat menurunnya produksi pangan dalam negeri. Komisi VII yang bermitra dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pengawasan dalam upaya pengembangan energi yang ramah lingkungan. Komisi VIII yang bermitra dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial dapat mengawasi upaya mitigasi dan adaptasi bencana karena perubahan iklim. Komisi IX yang bermitra dengan Kementerian Kesehatan dapat melakukan pengawasan terhadap upaya antisipasi berkembangnya penyakit akibat perubahan iklim.

Sementara dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR dapat mulai membentuk beberapa undang-undang yang memang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti RUU tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Penutup

Wilayah Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim. Dampak perubahan iklim sudah dirasakan di banyak wilayah. Untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim tersebut perlu dilakukan upaya antisipasi. Upaya antisipasi dapat dilakukan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab DPR. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim DPR dapat dilakukan melalui pelaksanaan ketiga fungsinya, yaitu fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi.

Referensi

- BMKG. 2016. Prakiraan Musim Hujan 2015-2016, di http://dataweb.bmkg.go.id/cews/pikam/pdf/PMH2015_2016.pdf. diakses tanggal 7 Januari 2016.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2007. *Rencana Aksi Nasional Dalam Menghadapi Perubahan Iklim*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- UNDP. 2007. *Sisi Lain Perubahan Iklim, Mengapa Indonesia harus Beradaptasi untuk Melindungi Rakyat Miskinnya*. Jakarta: UNDP Indonesia Country Office,
- “276 Rumah Terendam, Ratusan Warga Sempat Mengungsi”, *Kompas*, Kamis, 7 Januari 2016.
- “BMKG Imbau Waspada Kebakaran dan Banjir”, *Media Indonesia*, Selasa, 5 Januari 2016.
- “BMKG Masih Deteksi Titik Panas di Riau”, *Suara Pembaruan*, Rabu, 6 Januari 2016.
- “Empat Titik Panas Muncul Lagi di Riau”, *Kompas*, Kamis, 7 Januari 2016.
- “Dampak El Nino, Musim Tanam Padi Mundur”, *Republika*, Kamis, 7 Januari 2016.
- “Jalur Lampung-Bengkulu Terputus Lagi”, *Kompas*, Kamis, 7 Januari 2016.
- “Paceklik Lebih Lama”, *Republika*, Kamis, 7 Januari 2016.
- “Sekilas tentang Perubahan Iklim – Climate Change at a Glance”, di https://unfccc.int/files/meetings/cop_13/press/application/pdf/sekilas_tentang_perubahan_iklim.pdf, diakses tanggal 8 Januari 2016.